

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Husein Umar. (1996). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- John F. Due. (1985). *Keuangan Negara Perekonomian Dari Sektor Pemerintah..* (Penerjemah: Iskandarsyah dan Arif Janin, Jakarta: Universitas Indonesia).
- Lind Marchal Wathen. (2007). *Teknik-teknik Statistika Dalam Bisnis Dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global Buku 1*. (Penerjemah: Chriswan Sungkono, Jakarta: Salemba Empat).
- Lind Marchal Wathen. (2007). *Teknik-teknik Statistika Dalam Bisnis Dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global Buku 2*. (Penerjemah: Chriswan Sungkono, Jakarta: Salemba Empat).
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mohammad Zain. (2007). *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur Indriantoro & Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPEE.
- Riduwan. (2005). *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Rimsky K. Judiseno. (2007) *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Salamun AT. (1993). *Pokok-pokok Pemikiran, Pajak, Citra, dan Upaya Pembaruannya*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Sekaran, Uma. (2006). *Metode Penelitian untuk Bisnis, Edisi ke-4 Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. (2006). *Metode Penelitian untuk Bisnis, Edisi ke-4 Buku II*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana. (1993). *Statistika untuk Ekonomi dan Niaga, Edisi kelima, Buku II*. Bandung: Tarsito.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Bisnis Edisi Kesembilan*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suparmoko M. (1982). *Asas-asas Keuangan Negara*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Tahmid Hidayat.(2001). *Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Sebagai Usaha Peningkatan Penerimaan*. Berita Pajak No. 1442/Tahun XXXIII/1 Mei 2001 Halaman 42.

### **Internet**

[http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&id=8704%3Apenerimaan-pph-orang-pribadi-masih-minim&option=com\\_content&Itemid=125](http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&id=8704%3Apenerimaan-pph-orang-pribadi-masih-minim&option=com_content&Itemid=125)

### **Skripsi**

Abu Gandjar Aritosa Hidayat. (2008). *Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Skripsi.Bandung: Universitas Widyatama.

Fera Budiman. (2009). *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Tegallega*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Novia Lukmana. (2008). *Pengaruh Upaya Ekstensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan Julah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar (Studi Kasus Pada KPP Cimahi)*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 32/PJ./2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 175/PJ.2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha Di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 13/PJ.01/2007 tentang Biaya Pelaksanaan dan Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 13/PJ./2007 tentang Pejelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 175/PJ./2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tetang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.